



**BUPATI PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR 43 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 22 TAHUN
2019 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017-2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PRINGSEWU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/m.pan/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022, sudah tidak sesuai dengan kondisi yang ada sehingga harus dilakukan perubahan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pringsewu di Provinsi Lampung Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4932);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pringsewu (Lembaran Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2016 Nomor 16);
11. Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2019 Nomor 22).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PRINGSEWU NOMOR 22 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2017-2022.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Bupati Pringsewu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kabupaten Pringsewu Tahun 2019 Nomor 22), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup IKU terdiri dari IKU Pemerintah Kabupaten.
- (2) IKU Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pringsewu.

Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 26 September 2019

BUPATI PRINGSEWU,

dto

SUJADI

Diundangkan di Pringsewu
pada tanggal 26 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU,

dto

A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN 2019 NOMOR

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pringsewu


IHSAN HENDRAWAN, S.H

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
 NOMOR : 45
 TAHUN : 2019

DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR KINERJA UTAMA 2017-2022
 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU

Sasaran	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Sumber Data
1	2	3	4	5
Tersedianya jaringan jalan kondisi mantap	Prosentase jalan kabupaten kondisi mantap	%	$\frac{\text{Panjang jalan Kabupaten kondisi sedang dan baik}}{\text{Panjang jalan kab. seluruhnya}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Terwujudnya infrastruktur kawasan pemukiman dan perumahan berkualitas	Prosentase pemukiman kumuh.	%	$\frac{\text{Luas pemukiman kumuh}}{\text{Luas wilayah}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	Prosentase rumah layak huni.	%	$\frac{\text{jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah rumah}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Meningkatnya aksesabilitas dan kualitas pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa datang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk beusia 7 tahun ke atas.	Dinas Pendidikan dan kebudayaan
	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	Rata-rata lama sekolah (RLS)/maen Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan dalam menjalani pendidikan formal	Dinas Pendidikan dan kebudayaan

Sasaran	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Sumber Data
1	2	3	4	5
			<p>digunakan dalam menjalani pendidikan formal</p> $MYS = \frac{1}{P_{15+}} + \sum_{i=1}^{P_{15+}} (\text{lama sekolah penduduk ke } i)$ <p>Dengan : P 15 + = jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas</p>	
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan tidak ada perubahan pada mortalitas menurut umur	Dinas Kesehatan
Meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan anak dan pengendalian penduduk	Indeks Pembangunan Gender.	Indeks	<p>IPG digunakan untuk mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gander terjadi apabila nilai IPM sama dengan IPG.</p> $IPG = 1/3 [X_{ede (1)} + X_{ede (2)} + I_{inc-dsi}]$ <p>Xede (1) = xede untuk harapan hidup Xede (2) = xede untuk harapan pendidikan Iinc-dsi = Indeks distribusi pendapatan variable</p> <p>Nilai IPG berkisar antara 0-100 persen bila nilai semakin tinggi maka semakin tinggi kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan</p>	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Laju pertumbuhan penduduk	Indeks	<p>Jumlah penduduk pada tahun t dibagi jumlah penduduk pada tahun dasar</p> $r = \left(\frac{P_t}{P_0} \right)^{\frac{1}{t}} - 1$	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sasaran	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Sumber Data
1	2	3	4	5
	Status Kabupaten Layak Anak	Kategori	Kategori pemerintah Kabupaten dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatnya, prestasi olahraga dan pelestarian seni serta budaya	Jumlah Atlet yang berprestasi	Atlet	Jumlah atlet yang mendapat prestasi	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
	Persentase seni dan budaya daerah yang sudah ditetapkan	%	$\frac{\text{jumlah seni dan cagar budaya yang di tetapkan}}{\text{Total seni dan cagar budaya daerah}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan dan kebudayaan
Meningkatnya perekonomian perkapita masyarakat dan menurunnya kemiskinan	Laju pertumbuhan ekonomi	%	Persentase nilai PDRB berdasarkan harga konstan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UMKM; 2. Dinas Pemerintahan Pekon; 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 4. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata; 5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 6. Dinas Pertanian; dan 7. Dinas perikanan.

Sasaran	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Sumber Data
1	2	3	4	5
	Pendapatan per kapita penduduk (ADHB)	Rp. Juta per Tahun	Nilai PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) untuk harga yang sedang berlaku dibagi dengan Jumlah penduduk	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UMKM; 2. Dinas Pemerintahan Pekon; 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 4. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata; 5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 6. Dinas Pertanian; dan 7. Dinas perikanan
	Angka Kemiskinan.	%	<p><i>Head Count Index</i> (HCI-P0) adalah persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK)</p> $Pa = \frac{1}{n} + \sum_{i=1}^q \frac{(z - y_i)}{z}$ <p>Dimana :</p> <p><i>a</i> = 0</p> <p><i>z</i> =garis kemiskinan</p> <p><i>y_i</i> = rata-rata pengeluaran per kapita sebulan Penduduk dibawah garis kemiskinan (<i>i</i>=1,2,3....), <i>y_i</i><<i>z</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UMKM; 2. Dinas Pemerintahan Pekon; 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 4. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;

Sasaran	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Sumber Data
1	2	3	4	5
			<p>q = banyaknya penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan</p> <p>n = jumlah penduduk</p>	<p>5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;</p> <p>6. Dinas Pertanian;</p> <p>7. Dinas perikanan; dan</p> <p>8. Dinas Sosial</p>
	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	$\frac{\text{Jumlah pengangguran Terbuka usia angkatan kerja}}{\text{jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Pengeluaran per kapita	Rp. Juta per Tahun	Pengeluaran per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dikali 100%	<p>1. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UMKM;</p> <p>2. Dinas Pemerintahan Pekon;</p> <p>3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</p> <p>4. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata;</p> <p>5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;</p> <p>6. Dinas Pertanian;</p> <p>7. Dinas perikanan; dan</p> <p>8. Dinas Kesehatan; dan</p> <p>9. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.</p>

Sasaran	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Sumber Data
1	2	3	4	5
	Nilai Investasi	Rp. Juta per Tahun	Jumlah nilai investasi (PMDN/PMA) PMDN = Penanaman Modal Dalam Negeri PMA = Penanaman Modal Asing	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Terwujudnya ketahanan pangan yang berkualitas.	Skor Pola Pangan Harapan.	Nilai Skor	PPH = % angka kecukupan gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan	1. Dinas Pertanian; 2. Dinas Ketahanan Pangan; dan 3. Dinas Perikanan.
Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.	Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	Mengumpulkan data kualitas lingkungan untuk menentukan indeks kualitas lingkungan hidup. Indeks kualitas lingkungan hidup terdiri dari 3 indeks : 1. Indeks Kualitas Air 2. Indeks Kualitas Udara 3. Indeks Tutupan Lahan	Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Indeks RB	Nilai	Hasil evaluasi penerapan Reformasi Birokrasi oleh Kemenpan RB	Seluruh OPD
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	Nilai	Menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (<i>outcome</i>) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintah yang berorientasi kepada hasil (<i>result oriented government</i>)	Seluruh OPD

Sasaran	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Sumber Data
1	2	3	4	5
			<p>Aspek-aspek yang dinilai antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan (bobot 35%) <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan strategis; b. Perencanaan kinerja tahunan; c. Kontrak Kerja; dan d. Pemanfaatan dokumen perencanaan. 2. Pengukuran (bobot 20%) <ol style="list-style-type: none"> a. Indikator kinerja (umum); b. Indicator kinerja utama (IKU); c. Analisis hasil pengukuran. 3. Pelaporan (bobot 15%) <ol style="list-style-type: none"> a. Ketaatan; b. Pengungkapan dan kinerja penyajian; serta c. Pemanfaatan. 4. Evaluasi (bobot 10%) <ol style="list-style-type: none"> a. Pedoman evaluasi; b. Pelaksanaan kinerja evaluasi; dan c. Pemanfaatan hasil evaluasi. 5. Capaian (bobot 20%) <ol style="list-style-type: none"> a. Kinerja yang diungkap (indicator/kinerja, target, keandalan data); dan b. Pencapaian kinerja. 	
	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	Opini	Penilaian opini yang dikeluarkan BPK terhadap laporan keuangan daerah	Seluruh OPD

Sasaran	Indikator	Satuan	Definisi Operasional	Sumber Data
1	2	3	4	5
kualitas pelayanan publik secara prima.	Kepuasan Masyarakat.	Skor	<p>publik meliputi sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persyaratan; 2. Prosedur; 3. Waktu pelayanan; 4. Biaya; 5. Produk spesifikasi; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Maklumat pelayanan; 9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan. 	Publik, dan Kominfo

BUPATI PRINGSEWU.

dto

SUJADI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU

NOMOR : 43

TAHUN : 2019

PRINGSEWU

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2017-2022
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU

Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian						Kondisi Akhir
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Prosentase jalan kabupaten kondisi mantap	%	38.37	40.25	47.00	55.00	60.00	60.50	61.00	61.00
Prosentase pemukiman kumuh.	%	0.075	0.075	0.040	0.020	0.010	0	0	0
Prosentase rumah layak huni.	%	85.00	85.85	86.02	86.45	87.23	88.97	90.00	90.00
Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	12.76	12.96	13.17	13.38	13.59	13.81	14.03	14.03
Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7.84	7.94	8.04	8.15	8.25	8.36	8.47	8.47
Angka Harapan Hidup	Tahun	68.88	69.20	69.53	69.86	70.19	70.52	70.85	70.85
Indeks Pembangunan Gender.	Indek	92.27	92.73	93.18	93.64	94.09	94.55	95.00	95.00
Laju pertumbuhan penduduk	Indeks	1.20	1.17	1.13	1.10	1.07	1.03	1.00	1.00
Status Kabupaten Layak Anak	Kategori	-	Pratama	Pratama	Pratama	Madya	Nindya	Nindya	Nindya
Jumlah atlet yang berprestasi	Atlet	7	10	12	14	16	18	20	20
Prosentase seni dan budaya daerah yang sudah ditetapkan	%	50.50	52.50	55.50	60.00	65.00	67.50	70.00	70.00
Laju pertumbuhan ekonomi	%	5.04	5.00 - 5.05	5.06 - 5.10	5.11 - 5.15	5.16 - 5.20	5.21 - 5.25	5.26 - 5.30	5.30
Pendapatan per kapita penduduk (ADHB)	Rp. Juta per Tahun	22.78	23.92	24.64	25.25	25.88	27.18	27.86	27.86
Angka Kemiskinan.	%	11.73	11.61	11.05	10.48	9.95	9.50	8.75	8.75
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.85	3.71	3.57	3.42	3.28	3.14	3.00	3.00
Pengeluaran per kapita	Rp. Juta per Tahun	9,533.10	9,775.35	10,023.85	10,278.68	10,539.98	10,807.92	11,082.68	11,082.68

Indikator	Satuan	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir	
			2017	2018	2019	2020	2021		2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Nilai investasi	Rp. Juta per Tahun	2,526.21	2,778.83	3,056.71	3,362.39	3,698.62	4,068.49	4,475.34	4,475.34
Pola Pangan Harapan.	Nilai Skor	84.10	84.10	86.50	88.00	90.00	91.50	92.50	92.50
Indeks kualitas lingkungan hidup	Indeks	48.90	52.00	54.00	56.00	57.00	58.00	59.00	64.00
Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	B	B	B	B	B	B	B	B
Nilai akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	Nilai	C	CC	CC	B	B	B	BB	BB
Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat.	Nilai Skor	79.50	79.80	80.15	82.00	84.25	86.45	87.50	87.50

BUPATI PRINGSEWU,

dto

BUJADI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI PRINGSEWU

NOMOR : 45
TAHUN : 2019

TEWANG

PRIORITAS PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PRINGSEWU

Sasaran	Indikator	Program	OPD Pengampu
1	2	3	4
Tersedianya jaringan jalan kondisi mantap	Prosentase jalan kabupaten kondisi mantap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan 2. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong gorong/Talud 3. Pemeliharaan/Rehabilitasi/Rekonstruksi Jalan dan Jembatan 4. Penyediaan Peralatan dan Perbekalan 5. Pembinaan Konstruksi 6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Negara 7. Peningkatan Sarana Dan Prasarana Fasilitas Publik 8. Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 9. Rehabilitasi /Pemeliharaan Jaringan Irigasi, Rawa, Jaringan Pengairan Lainnya 	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Terwujudnya infrastruktur kawasan pemukiman dan perumahan berkualitas	Prosentase pemukiman kumuh.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan Drainase Lingkungan Pemukiman 2. Pengembangan Kawasan permukiman 3. Penyehatan Lingkungan Permukiman 4. Penyehatan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 5. Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Sasaran	Indikator	Program	OPD Pengampu
1	2	3	4
	Prosentase rumah layak huni.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Tata Ruang 2. Pemanfaatan Ruang 3. Pengembangan Perumahan 4. Lingkungan Sehat Perumahan 5. Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial 	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Meningkatnya aksesabilitas dan kualitas pendidikan	Angka Harapan Lama Sekolah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 tahun 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Sekolah 3. Peningkatan Mutu Pendidikan Tenaga Kependidikan 4. Manajemen Pelayanan Pendidikan 	Dinas Pendidikan dan kebudayaan
	Rata-rata Lama Sekolah	<ol style="list-style-type: none"> 1. PAUD 2. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 3. Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 4. Manajemen Pelayanan Pendidikan 	Dinas Pendidikan dan kebudayaan
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Pengadaan, Peningkatan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas dan Jaringannya 3. Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata 4. Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 5. Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 6. Obat dan Perbekalan Kesehatan 7. Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat 8. Pengembangan Lingkungan Sehat 9. Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 10. Perbaikan Gizi Masyarakat 11. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Tidak Menular 	Dinas Kesehatan

Sasaran	Indikator	Program	OPD Pengampu
1	2	3	4
Meningkatnya kesetaraan gender, perlindungan anak dan pengendalian penduduk	Indeks Pembangunan Gender.	Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Laju pertumbuhan penduduk	Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Status Kabupaten Layak Anak	Perlindungan Anak	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatnya, prestasi olahraga dan pelestarian seni serta budaya	Jumlah Atlet yang berprestasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pembinaan Olahraga Prestasi 2. Peningkatan Pembinaan Olahraga Rekreasi 	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
.	Persentase seni dan budaya daerah yang sudah ditetapkan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Nilai Budaya 2. Pengelolaan Keragaman Budaya 3. Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya 	Dinas Pendidikan dan kebudayaan
Meningkatnya perekonomian perkapita masyarakat dan menurunnya kemiskinan	Laju pertumbuhan ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Keci Menengah (UKM) 2. Peningkatan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pekon 3. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun pekon 4. Peningkatan Akuntabilitas Pekon 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UMKM; 2. Dinas Pemerintahan Pekon;

Sasaran	Indikator	Program	OPD Pengampu
1	2	3	4
		5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Pekon 6. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 7. peningkatan produksi pertanian dan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura 8. peningkatan produksi perkebunan 9. penyediaan bibit/ benih unggul dan tahan penyakit untuk pertanian dan peternakan 10. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 11. Asuransi Mikro Pertanian dan Peternakan 12. Pengembangan Budidaya Pertanian dan Peternakan 13. Pengembangan Produksi Perikanan Air Tawar 14. Optimalisasi Produk Perikanan Pasca Panen dan Pengawasan 15. Pengembangan Pariwisata	3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 4. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata; 5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 6. Dinas Pertanian; dan 7. Dinas perikanan.
	Pendapatan per kapita penduduk (ADHB)	1. Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 2. Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 3. peningkatan produksi pertanian dan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura 4. peningkatan produksi perkebunan 5. Pengembangan Produksi Perikanan Air Tawar 6. Optimalisasi Produk Perikanan Pasca Panen dan Pengawasan	1. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UMKM; 2. Dinas Pemerintahan Pekon; 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 4. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata; 5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 6. Dinas Pertanian; dan 7. Dinas perikanan
	Angka Kemiskinan.	1. Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 2. Peningkatan Perkembangan Pekon 3. Pengembangan Industri Kecil dan Mengengah	1. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UMKM;

Sasaran	Indikator	Program	OPD Pengampu
1	2	3	4
		4. Peningkatan Teknologi Industri 5. Pengembangan Produksi Perikanan Air Tawar 6. Optimalisasi Produk Perikanan Pasca Panen dan Pengawasan 7. Kualitas Tenaga Kerja 8. Peningkatan Kesempatan Kerja 9. Perlindungan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja 10. Pembinaan dan Penempatan Warga Transmigrasi 11. Pengentasan Kemiskinan	2. Dinas Pemerintahan Pekon; 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 4. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata; 5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 6. Dinas Pertanian; 7. Dinas perikanan; dan 8. Dinas Sosial
	Tingkat Pengangguran Terbuka	1. Kualitas Tenaga Kerja 2. Peningkatan Kesempatan Kerja 3. Perlindungan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja 4. Pembinaan dan Penempatan Warga Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	Pengeluaran per kapita	1. Pengembangan Produksi Perikanan Air Tawar 2. Optimalisasi Produk Perikanan Pasca Panen dan Pengawasan	1. Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UMKM; 2. Dinas Pemerintahan Pekon; 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 4. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata; 5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 6. Dinas Pertanian; 7. Dinas perikanan;

Sasaran	Indikator	Program	OPD Pengampu
1	2	3	4
			8. Dinas Kesehatan; dan 9. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
	Nilai Investasi	Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Terwujudnya ketahanan pangan yang berkualitas.	Skor Pola Pangan Harapan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Ketersediaan Pangan 2. Keanekaragaman Konsumsi Pangan B2SA 3. Peningkatan Distribusi Pangan 4. peningkatan produksi pertanian dan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura 5. peningkatan produksi perkebunan 6. penyediaan bibit/ benih unggul dan tahan penyakit untuk pertanian dan peternakan 7. Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 8. Asuransi Mikro Pertanian dan Peternakan 9. Pengembangan Budidaya Pertanian dan Peternakan 10. Pengembangan Produksi Perikanan Air Tawar 11. Optimalisasi Produk Perikanan Pasca Panen dan Pengawasan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pertanian; 2. Dinas Ketahanan Pangan; dan 3. Dinas Perikanan.
Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.	Indeks kualitas lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan dan Pengelolaan Taman 2. Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 3. Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 4. Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 5. Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 	Dinas Lingkungan Hidup
Meningkatnya tata kelola pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 	Seluruh OPD

Sasaran	Indikator	Program	OPD Pengampu
1	2	3	4
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (AKIP)	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Seluruh OPD
	Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Opini BPK)	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Seluruh OPD
Meningkatnya kualitas pelayanan publik secara prima.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat.	1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan 2. Pengawasan dan Pengendalian Perizinan dan Non Perizinan	Seluruh OPD Pelayanan Publik, dan Kominfo

BUPATI PRINGSEWU,

dto

~~BUJADI~~